

TESIS
STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN PEKERJA
ECONOMY GIG DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
INDONESIA

LEGAL STATUS AND PROTECTION OF GIG ECONOMY
WORKERS UNDER INDONESIAN LABOUR LAW



Oleh:
YOSEPHINE FRANSISCA ANDRIANI
2310622028

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026

HALAMAN JUDUL

**STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN PEKERJA ECONOMY
GIG DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Pada Program Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

YOSEPHINE FRANSISCA ANDRIANI

2310622028

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN PEKERJA GIG
ECONOMY DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

YOSEPHINE FRANSISCA ANDRIANI

2310622028

Disetujui untuk Tahap SEMINAR HASIL PENELITIAN

Pada Tanggal 23 Desember 2025

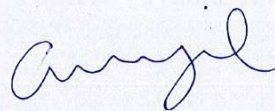
Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIP.196806081994032001

Pembimbing 2



Dr. Aurora Jilena Meliala, S.H., M.H.
NIP. 0308068801

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Yosephine Fransisca Andriani
NIM : 2310622028
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN PEKERJA GIG ECONOMY DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, 02 JUNI 2025.....

Yang Membuat Pernyataan



YOSEPHINE FRANSISCA ANDRIANI

NIM. 2310622028

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOSEPHINE FRANSISCA ANDRIANI

NIM : 2310622028

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN PEKERJA ECONOMY GIG DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Yosephine Fransisca Andriani

NIM. 2310622028



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904
Laman : hukum.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN PEKERJA ECONOMY GIG
DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

YOSEPHINE FRANSISCA ANDRIANI

NIM. 2310622028

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 08 Juli 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Dr. Aurora Jilena Meliala, S.H., M.H.
NIP. 0308068801

Pembimbing 2

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIP. 196806081994032001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Koordinator Program Studi
Magister Hukum

Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H.,
M.H.
NIP. 198910192025211048

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Status Hukum dan Perlindungan Pekerja Economy Gig dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”. Penulisan tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA.Comm, Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Dr. Suherman S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Dr. Aurora Jilena Meliala SH., M.H. selaku Pembimbing Pertama dan Dr. Atik Winanti SH, MH selaku Pembimbing Kedua yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, berdiskusi, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan bagi beliau dan keluarganya.
4. Kedua Orang tua saya yang tak henti-hentinya memberikan doa dan semangat dalam proses perkuliahan
5. Teruntuk sahabat-sahabat ku Ka Tony, Deborah, Wilda, Risa, Rindiani dan sahabat Magister Hukum UPNVJ Bang Abdul Hamid, Bang Anwar Ibrahim, Bang

Muhammad Afifullah, Ka Risca, Alisya Ivana, dan adikku Alisya Rahma Saebani. Semoga setelah lulus dari sini kita senantiasa terhubung dan berkolaborasi baik secara profesi maupun keilmuan. Semoga sehat dan berkah selalu.

6. Dan tidak lupa kepada teman-teman kantorku Vanisa, Chatrine, Mba Fathin, Mba Desi, Ka Nanda, Mba Ninuk, Mba Vivi, Mba Cicy, Mba Feby, dan Mba Rossyta yang lain tanpa mengurangi rasa hormat maaf tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Jakarta, 21 Desember 2025

Penulis



Yosephine Fransisca Andriani

ABSTRAK

Disrupsi ekonomi digital mentransformasi struktur ketenagakerjaan Indonesia dan menempatkan jutaan pekerja gig dalam kerentanan akibat kekosongan norma hukum positif. Korporasi platform kerap berlindung di balik status administratif dan asas kebebasan berkontrak untuk melegitimasi praktik kemitraan semu. Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis implikasi kekosongan norma tersebut serta mengonstruksi strategi transformasi hukum ketenagakerjaan nasional. Menggunakan Teori Transformasi Hukum Nonet-Selznick dan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, penelitian ini menunjukkan hukum nasional masih terjebak pada fase otonom yang kaku karena belum mampu menjangkau subordinasi modern berupa manajemen algoritmik. Melalui uji silang komparatif terhadap putusan Mahkamah Agung Inggris (worker limb-b) dan Ley Rider di Spanyol, disimpulkan bahwa Indonesia perlu mensintesis pendekatan moderat Inggris guna mencegah pelarian modal. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kategori hukum sui generis baru, yakni Pekerja Platform Digital (Dependent Contractor). Reformasi progresif ini wajib ditopang instrumen transparansi algoritma serta penerapan jaring pengaman sosial melalui sistem pungutan mikro terotomatisasi. Konfigurasi hukum responsif ini akan membebaskan pekerja dari penindasan algoritmik sekaligus menjaga fleksibilitas bisnis ekonomi digital di Indonesia.

Kata kunci: Ekonomi Gig; Kemitraan Semu; Manajemen Algoritmik; Kontraktor Bergantung; Hukum Progresif.

ABSTRACT

The disruption caused by the digital economy is transforming Indonesia's employment structure and placing millions of gig workers in vulnerable positions due to gaps in positive law. Platform corporations often rely on their administrative status and the principle of freedom of contract to legitimize sham partnership arrangements. This normative legal research aims to analyze the implications of these regulatory gaps and to construct a strategy for transforming Indonesia's national labor law framework. Drawing on Nonet and Selznick's Theory of Legal Transformation and Satjipto Rahardjo's Progressive Law Theory, this study demonstrates that national law remains trapped in a rigid autonomous phase because it has yet to adequately address modern forms of subordination, particularly algorithmic management. Through a comparative cross-examination of decisions of the Supreme Court of the United Kingdom concerning limb (b) workers and Spain's Rider Law, the study concludes that Indonesia needs to synthesize a moderate approach based on the British model in order to prevent capital flight. This study recommends the establishment of a new sui generis legal category, namely Digital Platform Workers (Dependent Contractors). This progressive reform must be supported by algorithmic transparency instruments and the implementation of a social safety net through an automated micro-contribution system. This responsive legal framework would liberate workers from algorithmic exploitation while preserving the flexibility of digital economy businesses in Indonesia.

Keywords: Gig Economy; Sham Partnership; Algorithmic Management; Dependent Contractor; Progressive Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
1. Manfaat Teoritis	18
2. Manfaat Praktis	18
E. Orisinalitas Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Kajian Teoritis	21
1. Teori Transformasi Hukum	21
2. Teori Hukum Progresif	25
B. Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	34
1. Sumber Hukum Primer	34
2. Sumber Hukum Sekunder	36

3. Sumber Hukum Tersier	37
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
5. Analisis Bahan Hukum	40
BAB IV PEMBAHASAN	45
A. Implikasi Kekosongan Norma Ketenagakerjaan terhadap Tanggung Jawab Platform Digital atas Hak Dasar Pekerja Gig Economy	45
1. Kekosongan Norma dan Legitimasi Kemitraan Semu (<i>Sham Partnership</i>) dalam Praktik Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)	45
2. Kerentanan Struktural, Manipulasi Algoritma, dan Penggerusan Hak-Hak Dasar Pekerja Gig Economy	58
3. Dekonstruksi Subordinasi Modern Melalui Paradigma Hukum Progresif: Menyingkap Tabir Perusahaan (<i>Piercing the Corporate Veil</i>)	69
B. Konstruksi Transformasi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Melalui Refleksi Yurisdiksi Asing	78
4. Stagnasi dan Watak Represif Hukum Otonom dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nasional	78
5. Uji Silang Yurisprudensi Ketenagakerjaan: Batas Fleksibilitas Kontraktual (Inggris) versus Intervensi Proteksionis (Spanyol)	84
6. Transformasi Menuju Hukum Responsif: Formulasi Kategori Hukum <i>Sui Generis</i> ("Pekerja Platform Digital") dan Jaring Pengaman Sosial Terotomatisasi	93
BAB V PENUTUP	100
A. KESIMPULAN	100
B. SARAN	101
DAFTAR PUSTAKA	115